ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (SIMYANDU-PPTSP) (Suatu Studi dalam Pembuatan Izin Tempat Usaha (ITU) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut)

Penerapan jaringan informasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai *good governance* dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Berbagai kegiatan kepemerintahan guna antara lain memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah dapat meningkatkan program pelayanan publik berteknologi tinggi. Bentuk nyata dari peningkatan pelayanan tersebut kepada masyarakat yaitu diimplementasikannya kebijakan Simyandu-PPTSP dalam pembuatan ITU sebagai salah satu bentuk dari penerapan aplikasi *e-Goverment* dalam rangka mempermudah masyarakat dalam melaksanakan proses perizinan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Menurut Edward III implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Edward III mengemukakan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu impelementasi kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) sikap, dan (4) struktur birokrasi yang baik.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Teknik Pengumpulan data yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang meliputi pengumpulan data, display data dan pengambilan keputusan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa keberhasilan aparatur Kantor PPTSP Kabupaten Garut dalam melaksanakan implementasi kebijakan Simyandu-PPTSP pembuatan ITU yang ditentukan oleh komunikasi dalam pelaksanaannya berjalan cukup efektif, hal tersebut dapat terlihat dari tingginya masyarakat pengguna aplikasi Simyandu-PPTSP. Sumber daya Kantor PPTSP Kabupaten Garut dinilai cukup layak dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Sikap dari aparatur Kantor PPTSP Kabupaten Garut mencerminkan aparatur yang mempunyai kualitas yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti tingkat kedisiplinan yang harus ditingkatkan. Kemudian struktur birokrasi pada aparatur Kantor PPTSP Kabupaten Garut berjalan cukup optimal, hal tersebut dapat dilihat dari *Standart Operating Procedures (SOP)* beserta adanya tanggung jawab dari aparatur Kantor PPTSP Kabupaten Garut dinilai cukup baik dalam melaksanakan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.